



MANAJEMEN STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESTINASI WISATA

(Studi Kasus di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma)

Romdana^{1*}, Ditasman¹, Faridah¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

Email : romdana@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 25 Agustus 2022

Direvisi : 28 Nopember 2022

Disetujui : 31 Desember 2022

Keywords:

Management, Strategy,
Tourism Potential

Kata Kunci:

Manajemen, Strategi, Potensi
Wisata

ABSTRACT

The results showed that the management of the village government's strategy in developing the potential of tourist destinations through three stages in strategy management, namely strategy formulation, strategy implementation and evaluation of village government strategies has been going quite well, but there are still some obstacles such as lack of public awareness in developing tourism through promotion and Another obstacle lies in funding because funding to develop tourism only comes from village funds. The role of the village government in developing tourism as a motivator, facilitator and dynamicator in developing the potential of tourist destinations in carrying out its role as the village government is not optimal enough. As a motivator, the village government has not been successful in motivating the community to develop tourism, as a facilitator, the village government has been quite good. It can be seen that in tourist objects, the facilities and infrastructure are fairly complete, as a dynamic, the village government has not succeeded in cooperating with third parties such as district or city governments and investors to cooperate in developing tourism in Napal Jungur Village.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata melalui tiga tahapan dalam manajemen strategi yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi pemerintah desa sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan wisata melalui promosi dan kendala lainnya adalah terletak pada pendanaan karena pendanaan untuk mengembangkan wisata hanya bersumber dari dana desa. Peran pemerintah desa dalam mengembangkan wisata sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator dalam mengembangkan potensi destinasi wisata dalam menjalankan sebagai perannya pemerintah desa belum cukup optimal. Sebagai motivator pemerintah desa belum berhasil memotivasi masyarakat untuk mengembangkan wisata, sebagai fasilitator pemerintah desa sudah cukup baik hal ini dapat diketahui bahwa di objek wisata kelengkapan sarana dan prasarana yang terbilang lengkap, sebagai dinamisator pemerintah desa belum berhasil menggandeng pihak ketiga seperti pemerintah kabupaten ataupun kota dan pihak investor untuk bekerjasama dalam mengembangkan wisata yang ada di Desa Napal Jungur.

PENDAHULUAN

Dalam teknologi globalisasi sekarang ini pariwisata sebagai sektor andalan, diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan, pemicu pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang kerja, terutama bagi masyarakat sekitar. Pengembangan potensi destinasi wisata yang terencana akan memberi manfaat bagi masyarakat. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang baik dan lengkap disekitar objek wisata merupakan faktor penting dalam mengembangkan potensi destinasi wisata. Kegiatan pariwisata mulai memiliki peranan yang penting dalam strategi-strategi ekonomi di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Kebijakan pembangunan sektor ekonomi tercantum bahwa



pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan mengingat negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih kurang tujuh belas ribu pulau dengan keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati memiliki potensi pariwisata baik budaya maupun keindahan alam yang cukup besar tersebar diberbagai daerah.

Dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, Bab II Pasal 4 disebutkan bahwa dampak pembangunan pariwisata di Indonesia sangat luas, mulai dari dampak terhadap perekonomian masyarakat, kesejahteraan rakyat, kemiskinan, hingga alam kelestarian. Undang-undang memberikan setiap daerah hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hal pembangunan daerah. Perancangan program pengembangan pariwisata, seperti pengembangan desa wisata sudah banyak dilakukan, hanya saja pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi.

Dalam mengembangkan potensi destinasi wisata ini pemerintah perlu adanya konsep manajemen publik dalam sektor pengembangan destinasi wisata lebih berfokus tentang bagaimana pihak pengelola mengembangkan destinasi yang ada. Manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill). Manajemen publik merupakan sebuah studi interdisipliner dari berbagai aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating dan controlling dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik (Keban dalam Nahdiyah, 2013).

Sejalan dengan pernyataan diatas, (Nor Ghofur, 2014) menuturkan Manajemen Publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian terhadap pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangannya Manajemen Publik diperlukan bagi sektor privat maupun sektor pemerintahan, Hal ini dilakukan untuk menunjang dan mengembangkan sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya alam maupun dalam bentuk lainnya.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Strategi

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.

Siagian (2004) mendefinisikan strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Strategi memiliki dasar atau rancangan untuk mencapai sasaran yang dituju. Setiap organisasi baik publik maupun organisasi privat memiliki langkah atau cara yang tersusun secara sistematis, keseluruhan langkah dengan perhitungan yang pasti guna untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan, inilah yang disebut dengan strategi.

Konsep Manajemen Strategi

Manajemen berasal dari kata management yang berarti pengelolaan, pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola sesuai dengan tata tertib dan fungsi manajemen itu sendiri.

Menurut (Yusmaniarti et al. 2021) menjelaskan manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran. Manajemen strategi adalah upaya untuk mengelola strategi agar tercapai tujuannya.

Menurut Wheelen dan Hunger (2013), bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan pengendalian.

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah pemerintah terkecil dari bagian pemerintah nasional. Pada prinsipnya



pemerintah desa memiliki tugas, yaitu:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan, umum, pembangunan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun maupun pembinaan terhadap masyarakat.
2. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah daerah baik dari kabupaten, provinsi dan pusat.
3. Tugas pokok tersebut melahirkan fungsi pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kehidupan dan situasi sosial masyarakat desa.
4. Pemerintah adalah proses, cara, dan tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis demokrasi, dan gubernur mengatur daerah tingkat 1 dan menguasai segala sesuatu yang dilakukan negara untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara.
5. Desa adalah masyarakat yang sah dengan batas wilayah yang berhak mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan kebiasaan daerah yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Pemerintah Desa

Peranan adalah mencakup tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Kemudian dipertegas oleh Komarudin (1994:768) yang mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen,
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status,
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau perantara
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya,
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran timbul karena kedudukan seseorang dalam menjalankan perilakunya dan ia tidak bekerja sendiri sebab memiliki lingkungan yang diperlukan untuk berinteraksi. Dengan demikian peranan merupakan kedudukan yang dimiliki seseorang dari setiap perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Begitu pula dalam pandangan Levinson (Soekanto, 2009:231), peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep Pengembangan Pariwisata

Konsep pariwisata telah berkembang dari waktu ke waktu. Namun pada hakikatnya konsep pariwisata adalah suatu bentuk pariwisata yang misinya adalah melestarikan kawasan alam, mendatangkan manfaat ekonomi, dan menjaga keutuhan lingkungan.

Menurut Sihite (Hanief dan Permana, 2018:1) mendefinisikan, Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain meninggalkan tempat semula dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan berusaha mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beragam. Pengembangan kepariwisataan haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata, yaitu:

- a. Atraksi, adalah pusat dari industri pariwisata. Maksudnya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karna ciri-ciri khas tertentu. Ciri khas yang menarik wisatawan adalah, keindahan alam, iklim dan cuaca dan kebudayaan.
- b. Amenitas adalah berbagai fasilitas penunjang para wisatawan untuk bewisata ke suatu daerah tujuan wisata dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut berhubungan dengan antara lain, akomodasi yang nyaman, fasilitas yang memadai, sikap masyarakat setempat, keamanan dan lain-lain.
- c. Aksesibilitas berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan



penncapaian suatu objek wisata. Serta unsur pendukung lainnya (pelaku industri pariwisata, masyarakat dan institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan wisatawan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya adalah sarana penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Atas dasar ini, empat kata kunci harus diperhatikan, yaitu: sarana, data, tujuan dan kegunaan ilmiah. Jalur ilmiah mengacu pada kegiatan penelitian yang didasarkan pada karakteristik ilmiah, empiris, dan sistematis. Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data tergantung pada apa yang dipelajari dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data dan pengumpulan informasi yang komprehensif dengan menggambarkan bagaimana manajemen strategis pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa tempat wisata di desa Napal Jungur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan satu-persatu temuan yang peneliti temukan dilapangan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah dikemukakan pada bab I, yaitu untuk mengetahui manajemen strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata dan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata, maka data para informan sangat dibutuhkan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman wawancara. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

Manajemen Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Manajemen strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata menggunakan teori Fred R. David (2011) tentang tahapan manajemen strategi sebagai berikut:

Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah proses penetapan suatu program atau rencana yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perumusan strategi memiliki beberapa poin yang meliputi perumusan visi dan misi, mengenali peluang dan ancaman dari luar organisasi, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan rencana pengembangan jangka panjang serta menghasilkan strategi alternatif.

Dengan adanya destinasi wisata yang ada di Desa Napal Jungur ini tentu memiliki visi misi. Dalam perumusan visi misi yang dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah desa melibatkan Perangkat desa, BPD, Bumdes serta Tokoh masyarakat dalam pembentukan visi dan misi dengan cara musyawarah.

Implementasi Strategi

Tahapan implementasi menurut Wheleen dan Hunger (2004) terdiri dari tiga tahapan. Ketiga tahap ini antara lain:

- a. Penetapan program,
- b. Penetapan anggaran,
- c. Penetapan prosedur

Pelaksanaan implementasi strategi harus dilengkapi dengan kebijakan agar dapat berjalan dengan baik, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa napal jungur pemerintah desa membuka peluang kepada masyarakat untuk berwirausaha di objek wisata. Berikut ini merupakan



kutipan wawancara Peneliti dengan Bapak Mas Mulyadi selaku Kepala Desa Napal Jungur:

“Tentu dalam pengelolaan wisata pemerintah mempunyai program-program untuk memajukan destinasi wisata yang ada di napal jungur ini, program-program tersebut antara lain adalah, pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis), membuka peluang kepada masyarakat untuk berwirausaha di objek wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, mempromosikan wisata bekerjasama dengan pihak pengelola wisata, serta melengkapi sarana dan prasarana untuk kenyamanan pengunjung.”(Hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 10:10 WIB)

Hasil wawancara bersama dengan kepala desa napal jungur tidak berbeda jauh dengan yang dikemukakan oleh Ketua Bumdes Bapak Medar Saprianto :

“Pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memperkerjakan para pemuda desa napal jungur di tempat wisata selain itu pemerintah juga membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaha di tempat wisata napal jungur.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 14:56 WIB)

Standar Operasional Prosedur Bagi Pengelola Wisata :

- a. Pengelola wisata adalah pokdarwis dibawah naungan kepala desa dan bumdes.
- b. Pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata yaitu pukul 08.30- 17.00 WIB.
- c. pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang ada dilokasi wisata secara berkala
- d. Pengelola harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai tupoksinya.
- e. Pengelola wajib menciptakan sapta pesona (keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, kenangan) di lingkungan wisata

Standar Operasional Prosedur Pengunjung :

- a. Jadwal berkunjung adalah pukul 07.30-17.00 WIB
- b. Pengunjung wajib membayar tiket masuk dan parkir untuk memasuki kawasan wisata
- c. Pengunjung harus menghormati tradisi, adat istiadat dan budaya yang ada di desa napal jungur
- d. Apabila terjadi kecelakaan pengunjung, maka pengunjung mendapat asuransi atau diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kesepakatan
- e. Pengunjung wajib mematuhi tata tertib yang ada dilingkungan wisata

Standar Operasional Prosedur Bagi Pedagang :

- a. Pedagang diutamakan dari masyarakat lokal desa napal jungur
- b. Pedagang dilarang menggunakan bahan pengawet dan bahan terlarang lainnya
- c. Pedagang dilarang melakukan persaingan secara tidak sehat sesama pedagang
- d. Pedagang diharuskan mewujudkan sapta pesona (keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, kenangan) dilingkungan wisata
- e. Pedagang diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 5000 perhari

Standar Operasional Prosedur Pendapatan :

Pembagian pendapatan dari hasil tiket adalah 30% : 70% yaitu 30% untuk pihak pengelola wisata dan 70% untuk Bumdes

Berdasarkan Penetapan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desatelah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku.

Evaluasi Strategi

Evaluasi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui ketika strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktivitas yang fundamental, yaitu meninjau ulang kembali faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur kinerja organisasi dan mengambil langkah korektif.

Pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap strategi yang dilakukan dengan cara memperbaiki



kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan strategi. Evaluasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa napal jungur ialah dengan meninjau kembali strategi yang dijalankan telah terlaksana dengan baik atau belum. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mas Mulyadi selaku Kepala Desa Napal Jungur sebagai berikut :

“Pemerintah desa dalam menjalankan strategi melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam mengembangkan wisata dengan melakukan rapat evaluasi setiap tahun bersama dengan bumdes dan pokdarwis. Tidak hanya itu pemerintah dalam mengevaluasi juga memperhatikan kinerja dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata berjalan dengan baik atau tidak dengan cara pemantauan langsung di objek wisata.” **(Hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 10:10 WIB)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah Desa Napal Jungur melakukan kegiatan evaluasi setiap tahun sekali guna untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam penerapan strategi.

Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator dalam pengembangan potensi destinasi wisata sangat diperlukan agar pembangunan dan pengembangan destinasi wisata terus berjalan. Pemerintah desa, pengelola wisata dan masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan wisata dapat terus berjalan dengan baik. Upaya pemerintah desa dalam memotivasi masyarakat terkait dengan pengembangan potensi destinasi wisata adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan serta dukungan pendanaan untuk membangun fasilitas fisik dalam rangka pengembangan potensi destinasi wisata. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Mas Mulyadi selaku Kepala Desa Napal Jungur sebagai berikut:

“Pemerintah memberikan binaan dan arahan terkait dengan pengembangan wisata. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dukungan fisik seperti dana untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tempat destinasi wisata.” **(Hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 10:10 WIB)**

Dari wawancara tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ketua Pokdarwis Maman Yudiansyah yaitu:

“Pemerintah desa sering memberikan pengarahan kepada kami selaku pengelola wisata untuk terus bekerjasama untuk membangun wisata. Melihat dukungan yang diberikan pemerintah desa untuk memajukan wisata seperti pendanaan yang pemerintah desa salurkan untuk membangun wisata agar wisata desa napal jungur ini semakin berkembang dan pemerintah desa membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaha ditempat wisata untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.” **(Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 14:38 WIB)**

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa motivasi atau dorongan yang diberikan pemerintah desa terkait dengan pengembangan potensi destinasi wisata adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengelola wisata dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat yang ingin berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Fasilitator

Sebagai fasilitator pengembangan potensi wisata, peran pemerintah desa adalah melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan wisata. Fasilitas fisik yang di sediakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan destinasi wisata disampaikan oleh ketua pokdarwis Maman Yudiansyah berikut :

“Anggaran yang diberikan pemerintah desa untuk melengkapi fasilitas wisata semuanya bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah desa untuk membangun dan melengkapi kebutuhan yang diperlukan untuk memajukan wisata.” **(Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 14:38 WIB)**

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagai fasilitator pemerintah desa membangun dan menyediakan fasilitas untuk pengembangan potensi wisata. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengoptimalkan fasilitas fisik tersebut dikemukakan oleh Ketua



Pokdarwis Maman Yudiansyah sebagai berikut:

“Sebagai pengelola wisata pokdarwis diberi amanat oleh pemerintah desa untuk menjaga fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah desa untuk dirawat sebaik mungkin agar fasilitas-fasilitas ini tidak cepat rusak karena menyangkut kepentingan bersama.”(Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 14:38 WIB)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, pemerintah desa bersama dengan pokdarwis melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas fisik yang ada secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar setiap fasilitas fisik yang telah disediakan oleh pemerintah desa dapat tetap berfungsi dengan baik dan memadai ketika di pergunakan oleh wisatawan yang datang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di desa napal jungur.

Dinamisator

Untuk mewujudkan pembangunan yang ideal, pemerintah desa, swasta dan masyarakat harus berkoordinasi dengan baik. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang

berperan dalam pengembangan wisata memiliki peran menggabungkan ketiga pihak tersebut, sehingga diantara keduanya terciptanya simbiosis mutualisme untuk pengembangan wisata di desa napal jungur. Seperti yang disebutkan sebelumnya belum ada pihak swasta ataupun investor yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata napal jungur. Pemerintah bersama dengan bumdes dan pokdarwis melakukan kerjasama untuk membangun dan mengembangkan wisata walau belum adanya pihak pemerintah kabupaten maupun kota yang mau diajak kerjasama dalam mengembangkan wisata napal jungur. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk mengembangkan wisata dengan kemandirian dari pemerintah desa dan pengelola wisata. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bumdes Napal jungur Bapak Medar Saprianto:

“Untuk saat ini belum ada pihak dari pemerintah kabupaten ataupun kota yang mau bekerjasama dalam mengembangkan wisata napal jungur, namun hal ini tidak menghalangi pemerintah desa untuk memajukan wisata, adapun cara yang dilakukan pemerintah desa untuk memajukan wisata yaitu dengan melakukan kerjasama antara bumdes dan pokdarwis.”(Hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 14:56 WIB)

Pendapat ketua bumdes hampir sama dengan Maman Yudiansyah selaku Ketua Pokdarwis terkait kerjasama pemerintah desa dengan pengelola wisata :

“Selama ini belum ada pihak pemerintah kabupaten maupun kota untuk memajukan wisata. Disini pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pengelola wisata seperti pokdarwis dan bumdes untuk mengembangkan destinasi wisata ini.”(Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 14:38 WIB)

Hasil wawancara tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator, pemerintah desa menjalin kerjasama dan bersinergi dengan pengelola wisata dalam mengembangkan wisata, hal ini dikarenakan belum ada yang mau bekerjasama dengan pemerintah desa dalam memajukan wisata seperti pemerintah kabupaten ataupun kota. Namun hal ini tidak menghalangi pemerintah desa untuk mengembangkan wisata dengan melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan wisata.

PEMBAHASAN

Manajemen Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Destinasi Wisata

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan yang telah dilakukan, maka diambil deskripsi umum tentang temuan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata di Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, meliputi tentang tahapan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Napal Jungur dalam pengembangan potensi destinasi wisata. Dari hasil temuan tersebut, kemudian peneliti berupaya untuk melakukan analisis hasil dari penelitian yang berkaitan dengan manajemen strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata.

Analisis ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor dan temuan dilapangan sebagaimana telah



dideskripsikan di hasil penelitian. Kemudian peneliti akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan teori David 2011 tentang tahapan manajemen strategi yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

Formulasi Strategi

David menjelaskan bahwa dalam perumusan strategi memiliki beberapa poin yang meliputi perumusan visi dan misi, mengenali peluang dan ancaman dari luar organisasi, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan rencana pengembangan jangka panjang serta menghasilkan strategi alternatif.

Penetapan visi dan misi pemerintah desa disini dalam mengembangkan potensi wisata yaitu membangun kerjasama antara pemerintah desa dengan pengelola wisata, mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam yang ada, guna untuk mewujudkan Desa Napal Jungur sebagai desa wisata dan mewujudkan desa yang lebih unggul dibidang pariwisata. Dalam visi pemerintah desa ini berfokus pada peningkatan pendapatan asli desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Napal Jungur.

Dalam identifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan dengan melihat berbagai faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, serta faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Dalam penguatan pengelolaan wisata air terjun yang ada di Desa Napal Jungur memiliki berbagai macam peluang yang dapat mendukung pengembangan potensi wisata, peluang yang dimiliki di kawasan wisata air terjun Napal Jungur ini adalah terletak pada nuansa alam yang masih alami serta kondisi air yang berwarna hijau dan dasar air yang berbentuk napalan yang membuat wisata ini memiliki daya tarik tersendiri. Sedangkan untuk ancaman dari faktor eksternal, ancaman seperti curah hujan yang tinggi dapat membuat debit air menjadi bertambah, jalan yang curam dapat membahayakan para pengunjung dan biasanya juga terjadi pohon tumbang serta longsor akibat hujan yang dapat membuat akses jalan tertutup.

Sedangkan permasalahan internal dalam organisasi dapat diketahui bahwa wisata yang ada di Desa Napal Jungur dilihat dari faktor kekuatan dan kelemahan dalam mengembangkan wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kekuatan adalah faktor yang digunakan sebagai hal yang dapat menjadi pendongkrak pengelolaan destinasi wisata yaitu, pemerintah desa mendukung sepenuhnya pengembangan potensi destinasi wisata dengan melakukan kerjasama yang baik bersama bumdes dan membentuk pokdarwis untuk mengelola dan mengembangkan wisata.

Implementasi Strategi

Pelaksanaan implementasi strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan tahapan implementasi yaitu penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur sudah berjalan. Pada penetapan program pemerintah desa mempunyai program untuk kemajuan destinasi wisata, pemerintah desa napal jungur membuat struktur organisasi yang efektif, dalam poin ini dilakukan pembentukan struktur organisasi oleh pemerintah desa napal jungur yaitu pokdarwis yang mempunyai tugas untuk mengelola wisata yang dibawah naungan Bumdes, struktur organisasi yang dibuat berfungsi untuk mengatur kinerja, tupoksi masing-masing anggota, serta tanggungjawab yang dipegang. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan mempermudah proses pengembangan wisata, mengingat wilayah Desa napal jungur yang cukup luas dan memiliki potensi wisata. Dalam penetapan program ini pelaksanaannya sudah berjalan yaitu dengan cara mempromosikan wisata untuk menarik jumlah pengunjung dan minat kunjung wisatawan terhadap destinasi wisata air terjun napal jungur, dalam hal ini pokdarwis melakukan promosi melalui sosial media. Namun dalam hal mempromosikan objek wisata ini ada kendala yang dihadapi oleh pengelola wisata dan pemerintah desa karena masyarakat desa napal jungur ini kurang ikut berpartisipasi dalam mempromosikan wisata hal ini menjadi suatu hambatan dalam mengembangkan objek wisata.

Evaluasi Strategi

Langkah evaluasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pemerintah desa napal jungur melakukan peninjauan kembali strategi yang dijalankan telah terlaksana dengan baik atau belum. Pemerintah Desa Napal Jungur melakukan kegiatan evaluasi setiap tahun sekali guna untuk



memperbaiki kesalahan atau kekurangan- kekurangan dalam penerapan strategi.

Selain itu dalam evaluasi strategi pemerintah desa melakukan pengukuran kinerja dari organisasi dengan melakukan pemantauan langsung ke objek wisata guna untuk meninjau apakah kinerja dari pihak yang berjalan dengan baik atau tidak. Dalam mengambil langkah korektif yang dilakukan pemerintah desa untuk mengevaluasi strategi tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi strategi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi hanya sebatas mengadakan rapat untuk membahas evaluasi setahun sekali dan memantau kinerja dari pihak pengelola. Hal ini dirasa kurang efektif dalam melakukan evaluasi strategi, evaluasi yang baik dilakukan setiap bulan atau enam bulan sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal didalam mengembangkan wisata.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Destinasi wisata

Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator dalam pengembangan wisata diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan, pemerintah desa adalah lembaga yang mempunyai kedudukan yang dimana pada posisi statusnya mempunyai kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam memberikan motivasi kepada pihak-pihak sektoral yang akan mendukung kegiatan peningkatan potensi wisata yang ada di wilayah kekuasaannya (Pitana & Gayatri,2005). Menurut Mudjiono (2009) menyebutkan bahwa motivator atau

motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia, lebih jelas lagi menurut Sardirman (2007) mengatakan bahwa motivator atau motivasi mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Peran pemerintah desa sebagai motivator yang mendorong pengelola wisata dan masyarakat untuk bergerak mengelola dan mengembangkan destinasi wisata air terjun yang ada di Desa Napal Jungur. Motivasi atau dorongan yang diberikan pemerintah desa terkait dengan pengembangan potensi destinasi wisata adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengelola wisata dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat yang ingin berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Fasilitator

Peran sebagai fasilitator adalah peran pemerintah desa sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan wisata peningkatan potensi destinasi wisata yang ada di wilayah otonominya, serta dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya peran itu sendiri meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan, prosedur perencanaan dan penetapan peraturan (Pitana & Gayatri 2005).

Pemerintah Desa Napal Jungur menyediakan sarana dan prasarana. fasilitas yang dilengkapi oleh pemerintah desa seperti, tempat parkir, toilet, Pondok-pondok untuk bersantai, pemandu wisata, pelampung, spot foto dan lain sebagainya. Pemerintah desa dalam hal melengkapi fasilitas pengembangan wisata sudah cukup optimal.

Dinamisator

Menurut Pitani dan Gayatri (2005:95) mengatakan bahwa dalam pilar good govermence pihak pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersinergi agar dapat berlangsung pembangunan yang hebat. Untuk mewujudkan pembangunan yang ideal, pemerintah, swasta dan masyarakat harus berkoordinasi dengan baik.

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengembangan wisata memiliki peran menggabungkan ketiga pihak tersebut, sehingga diantara keduanya terciptanya simbiosis mutualisme untuk pengembangan wisata di Desa Napal Jungur. Seperti yang disebutkan sebelumnya belum ada pihak swasta ataupun investor yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata Napal Jungur. Pemerintah bersama dengan bumdes dan pokdarwis melakukan kerjasama untuk membangun dan mengembangkan wisata, walau belum adanya pihak pemerintah kabupaten maupun kota yang mau diajak kerjasama dalam mengembangkan wisata napal jungur. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk mengembangkan wisata dengan kemandirian dari pemerintah desa dan pengelola wisata.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Manajemen strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi destinasi wisata di Desa Napal Jungur sudah berjalan dengan baik, dilihat dari tahapan dalam manajemen strategi yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi, Namun dalam pengembangan destinasi wisatamasih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengembangkan potensi destinasi wisata seperti minimnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat serta lahan diobjek wisata masih milik masyarakat setempat.

Dalam pengembangan potensi destinasi wisata di Desa Napal Jungur masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai motivator, pemerintah desa belum berhasil memotivasi masyarakat dan pihak ketiga dalam pengembangan potensi destinasi wisata, Peran sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi destinasi wisata sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana yang sudah lengkap di destinasi wisata yang ada di Desa Napal Jungur, selain itu peran sebagai dinamisator dalam mengembangkan wisata belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan pemerintah desa belum berhasil menjalin kerjasama bersama pemerintah kabupaten atau propinsi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Manajemen Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Destinasi Wisata”di Desa Napal Jungur ada beberapa saran yang direkomendasi oleh peneliti antara lain :

1. Agar masyarakat sadar akan potensi destinasi wisata pemerintah desa diharapkan mampu membangun motivasi-motivasi dan melakukan pembinaan atau pengarahan terhadap masyarakat tentang pentingnya potensi destinasi wisata, keberhasilan suatu wisata sangat perlunya dukungan dari masyarakat setempat untuk membangun wisata agar kegiatan wisata dapat berkembang dengan baik.
2. Pemerintah desa perlu membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten ataupun kota untuk membangun wisata yang lebih baik dengan adanya kerjasama yang terjalin tersebut mempermudah pemerintah desa dalam mengembangkan wisata seperti pendanaan ataupun keperluan lainnya yang diperlukan dalam mengembangkan wisata.
3. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat melakukan perbaikan terhadap akses jalan menuju wisata di Desa Napal Jungur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Fahmi, (2021). “Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9. No. 2 . 171-18.
- Agustin, A. (2018). “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”. (Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya).
- Ahmad (2020) . “Manajemen Strategi”. Makassar : Nas Media Pustaka 202
- Ainia, D. Z., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2021).” Peran Pemerintah Desa Sekapuk Dalam Pengembangan Objek Wisata Bukit Setigi Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik”. *Respon Publik*, 15(6), 57-63.
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). “Peran Pemerintah Desa Purworejo Dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (Jihi3s)*, 2(3), 291-303.
- Ganar, Yb, Sahroni, S., Zulfitra, Z., Apriansyah, M., & Susanto, S. (2021). *Manajemen Strategi Pengembangan Wisata Goa Gudawang*. Abdi Laksana: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 2 (1), 83-87.
- Hilman, Ya, & Putri, Rhn (2022). “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Destinasi Wisata



- Sawah Lungguh Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* , 12 (1), 12-20.
- Iswanti, S. I. S., & Zulkarnaini, Z. (2022). “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92-103.
- Martins, Z., Paturusi, Sa, & Surya, Ibk (2017). “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Branca Metiaut, Dili. *Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)*”. 3 (2), 372-386.
- Putri, Ra, Fiadi, A., & Sulhani, S. (2021). “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Tangkas Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muaro Jambi”. (Disertasi Doktor, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Ristarnado, R., Settyoko, J., & Harpinsyah, H. (2019). “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata”. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* , 1 (1), 40-51.
- Robinson, Tk, Kiyai, B., & Mambo, R. (2019). “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. *Jurnal Administrasi Publik* , 5 (84).
- Rudin, Is, Faruk, A., & Huda, Iais (2021). “Strategi Pemerintah Desa Tuo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Sigerincing Di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin”. (Disertasi Doktor, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Setyoko, J., & Ristarnado, R. (2021). “Strategi Pemerintahan Desa Tanjung Alam Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Dalam Pengembangan Wisata Telaga Biru”. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* , 3 (1), 1-17.
- Sugiyono, (2016). “Metodologi Penelitian”. Bandung : Alfabeta.
- Yusmaniarti, Yusmaniarti, Lastini Nur Sholihah, Ummul Khair, and Marini Marini. 2021. “Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations.” *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)* 2 (2): 123–66. <https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>.